



RANCANGAN AKHIR RENSTRA 2025-2029



RIAU RUMPUN
MELAYU,
MERAHAT TUAH
MENJAGA
MARWAH

TAKKAN MELAYU
HILANG DI BUMI



BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI RIAU
2025

**PERGUB RENSTRA PERANGKAT DAERAH
2025-2029**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH.....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah.....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.....	II-1
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah.....	II-3
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	II-13
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah.....	II-27
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	II-27
2.1.6 Dukungan Bumd Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	II-29
2.1.7 Data Perkembangan Kerjasama Daerah Provinsi Riau.....	II-31
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah.....	II-32
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah.....	II-32
2.2.2 Isu Strategis.....	II-35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.....	III-1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.....	III-4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH.....	IV-1
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Sekretariat Daerah..	IV-1
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan.....	IV-21
4.3 Subkegiatan Prioritas rangka mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-56
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah.....	IV-62
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah.....	IV-62
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-4
Tabel 2.2	Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Golongan.....	II-5
Tabel 2.3	Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan.....	II-6
Tabel 2.4	Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-7
Tabel 2.5	Komposisi PPPK Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-8
Tabel 2.6	Komposisi PPPK Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Golongan.....	II-8
Tabel 2.7	Komposisi PPPK Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan.....	II-9
Tabel 2.8	Komposisi PPPK Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-9
Tabel 2.9	Komposisi Non PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-10
Tabel 2.10	Komposisi Non PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan.....	II-11
Tabel 2.11	Rekapitulasi Inventaris Aset Sekretariat Daerah Provinsi Riau Per 31 Desember 2024.....	II-12
Tabel 2.12	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-13
Tabel 2.13	Indeks Nilai IP ASN Provinsi Riau Tahun 2021-2024.....	II-14
Tabel 2.14	Indeks Sistem Merit Provinsi Riau Tahun 2019-2024.....	II-16
Tabel 2.15	Perkembangan Survey Nilai Indes BerAKHLAK Provinsi Riau Tahun 2022-2024.....	II-17
Tabel 2.16	Perkembangan Hasil Penilaian Integritas Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021-2024.....	II-18
Tabel 2.17	Perkembangan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021-2024.....	II-20
Tabel 2.18	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024.....	II-20

Tabel 2.19	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-21
Tabel 2.20	Indeks Reformasi Hukum Provinsi Riau Tahun 2023-2024.....	II-22
Tabel 2.21	Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-22
Tabel 2.22	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Provinsi Riau Tahun 2021-2024.....	II-23
Tabel 2.23	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-23
Tabel 2.24	Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-24
Tabel 2.25	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Riau Tahun 2020 - 2023.....	II-24
Tabel 2.26	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-25
Tabel 2.27	Kerjasama Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2024.....	II-26
Tabel 2.28	Evaluasi Renstra Tahun 2019-2024.....	II-26
Tabel 2.29	Pemetaan Masalah	II-33
Tabel 2.30	Analisis Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-36
Tabel 3.1	Perumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.....	III-3
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau.....	III-5
Tabel 3.3	Perumusan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.....	III-6
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	IV-3
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Provinsi Riau.....	IV-21
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-57
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama(IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Riau...	IV-62
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Provinsi Riau...	IV-62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah.....	I-2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Sekretariat Daerah.....	I-2
Gambar 2.1	Bagan Struktur Sekretariat Daerah.....	II-3
Gambar 2.2	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	II-25
Gambar 2.3	Bagan Hubungan Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.....	II-28
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD.....	III-1
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	III-2
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra PD.....	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

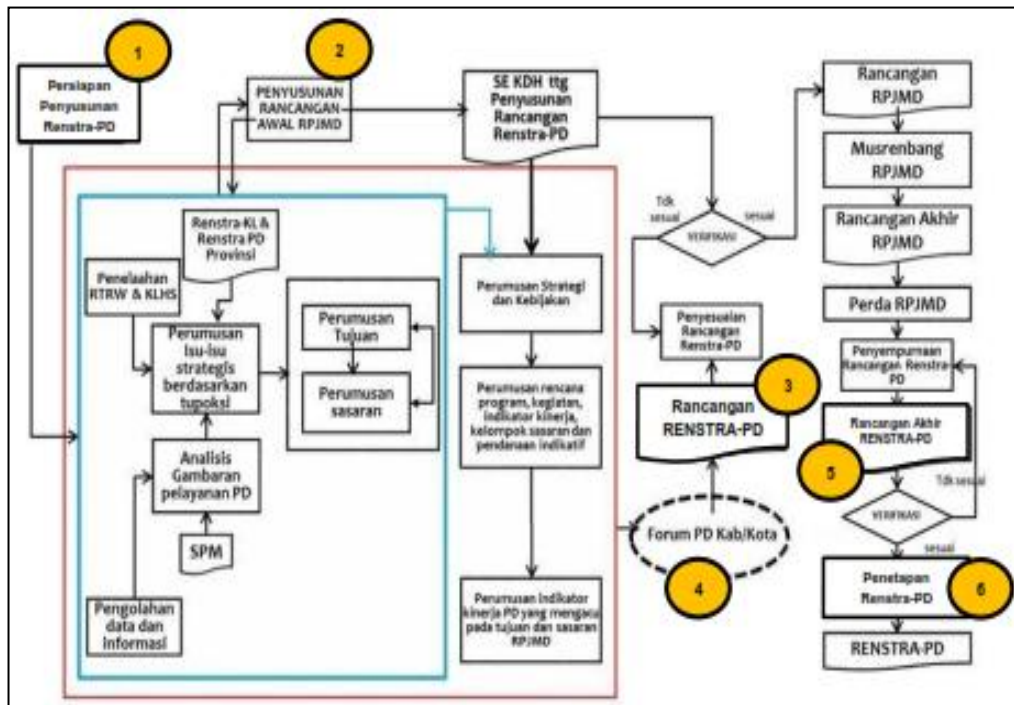
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya.

Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Proses penyusunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah, berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan Renstra K/L terkait dan Renstra Kabupaten/Kota dan pada akhirnya Renstra akan menjadi pedoman Sekretaris Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah, keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat pada bagan alur berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Sekretariat Daerah.



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Resntra Sekretariat Daerah Provinsi Riau memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nmr 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. **Peraturan Daerah No. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor);**

21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah strategis Jangka Menengah Sekretariat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja Sekretariat Daerah. Permasalahan dan isu strategis Sekretariat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

b. Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah :

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Sekretariat Daerah;
- 2) Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah Sekretariat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;
- 3) Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun;
- 4) Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah
 - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.7. Data Perkembangan Kerjasama Daerah Provinsi Riau
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029
- 3.2. Strategi Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029
- 3.3. Arah Kebijakan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH

- 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Sekretariat Daerah
- 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan
- 4.3. Subkegiatan Prioritas rangka mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah
- 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Riau dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah (Gubernur) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dengan menjalankan tugas pokok dalam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan

Sekretariat Daerah berperan dalam merumuskan dan menyusun berbagai kebijakan daerah, termasuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah

Sekretariat Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari berbagai Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan keselarasan dan efektivitas dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik;

3. Menyelenggarakan pelayanan administratif

Sekretariat Daerah menyediakan pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah dan juga masyarakat, termasuk pengelolaan keuangan, aset, hubungan masyarakat, dan pelayanan kepegawaian;

4. Pembinaan Aparatur Sipil Negara

Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

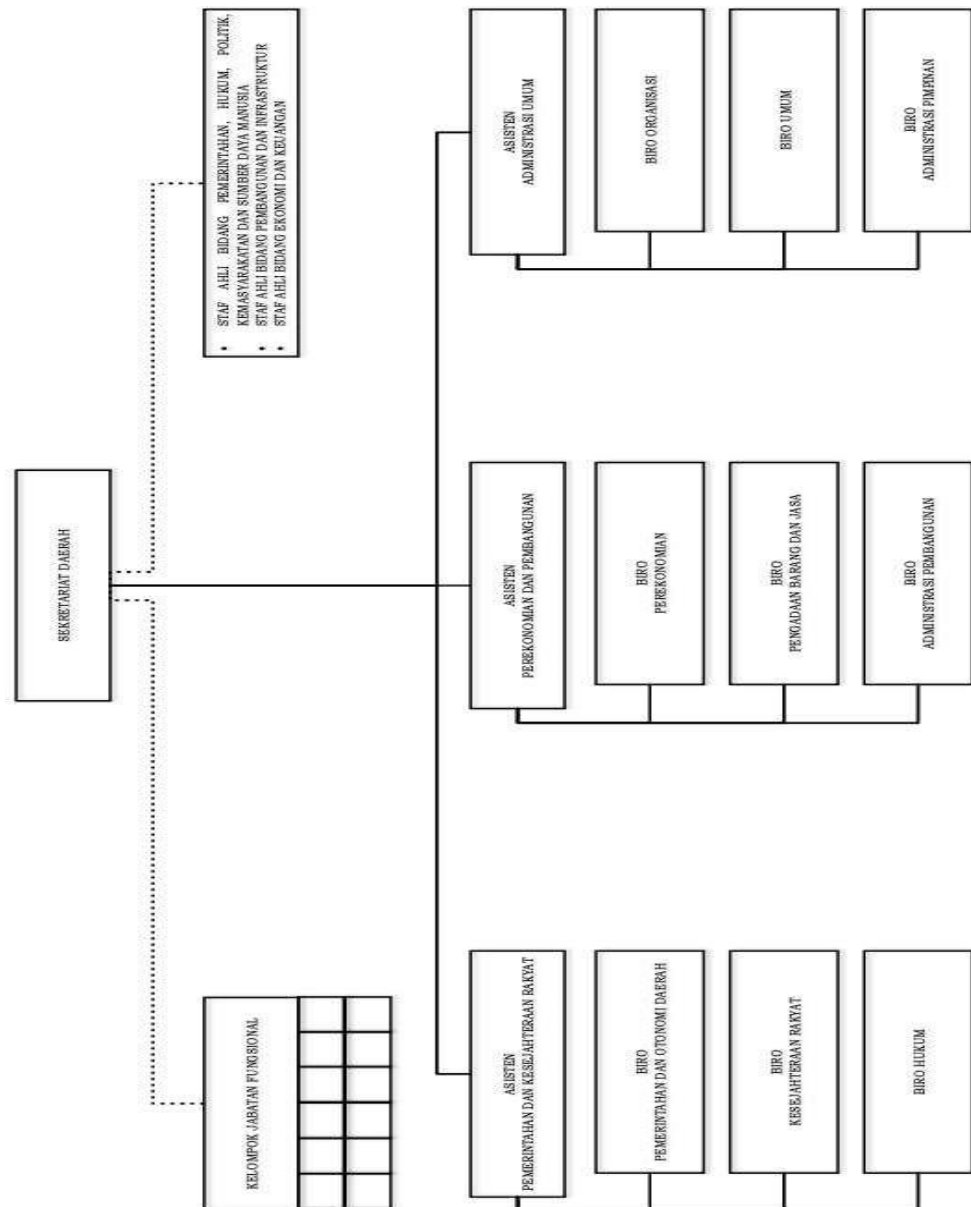
Sekretariat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Daerah untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah juga dapat ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum yang merupakan unsur staf Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Dimana setiap Asisten mengkoordinasikan beberapa Biro sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Sekretariat Daerah



2.1.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Riau memerlukan sumber daya untuk menggerakkan roda organisasi, dimana sumber daya Sekretariat Daerah Provinsi Riau meliputi sumber daya manusia (pegawai), anggaran, fasilitas fisik (gedung, kendaraan, peralatan), serta data dan informasi yang dikelola oleh sekretariat. Selain itu, terdapat juga dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau.

A. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Daerah Provinsi Riau memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup beragam yang merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Pegawai Non PNS yang dipekerjakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tertentu yang bekerja di berbagai bidang dan unit kerja di Sekretariat Daerah, yang kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam berbagai Biro/Unit Kerja. Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum, berdasarkan golongan, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Provinsi Riau didukung oleh 442 PNS dan 538 orang Non PNS, maka total keseluruhan SDM di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau berjumlah 980 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STRUKTUR ORGANISASI	JENIS KELAMIN		JUMLAH(ORANG)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretaris Daerah	1	0	1
2	Asisten Sekretaris Daerah	2	1	3
3	Staf Ahli	3	0	3
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	28	11	39
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	25	24	49
6	Biro Hukum	22	18	40
7	Biro Perekonomian	20	20	40
8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	40	16	56
9	Biro Administrasi Pembangunan	14	12	26
10	Biro Organisasi	17	23	40
11	Biro Umum	46	36	82
12	Biro Administrasi Pimpinan	45	18	63
	JUMLAH	263	179	442

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan (data per Juni 2025)

Komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Provinsi Riau terbanyak berada di Biro Umum sebanyak 82 orang atau sekitar 18,55% dari total PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari 46 orang laki-laki dan 36 orang perempuan. Hal itu dikarenakan Biro umum meliputi beberapa kegiatan teknis yang membutuhkan banyak pegawai karena gabungan dari beberapa fungsi seperti rumah tangga pimpinan, keuangan ada aset serta tata

usaha. Sedangkan PNS dengan jumlah paling sedikit yaitu pada Biro Administrasi Pembangunan yaitu berjumlah 26 orang atau sekitar 5,88 % yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Secara keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah 442 orang yang terdiri dari 263 orang laki-laki dan 179 orang perempuan. Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau jumlah PNS dengan jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah PNS dengan jenis kelamin perempuan.

Pada tabel dibawah ini, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau didominasi Golongan III, yaitu sebanyak 338 orang, diikuti Golongan IV sebanyak 72 orang, Golongan II sebanyak 31 orang dan terakhir Golongan I sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan

NO	STRUKTUR ORGANISASI	Golongan				JUMLAH (ORANG)
		I	II	III	IV	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	1	1
2	Asisten Sekretaris Daerah	-	-	-	3	3
3	Staf Ahli	-	-	-	3	3
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	32	7	39
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	5	38	7	50
6	Biro Hukum	-	1	30	10	41
7	Biro Perekonomian	1	-	29	10	40
8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	1	48	6	55
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	1	16	9	26
10	Biro Organisasi	-	2	31	7	40
11	Biro Umum	-	14	64	3	81
12	Biro Administrasi Pimpinan	0	7	50	6	63
	JUMLAH	1	31	338	72	442

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan (data per Juni 2025)

Jika ditinjau berdasarkan jenjang jabatan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Provinsi Riau bisa dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (ORANG)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretaris Daerah	1	0	1
2	Staf Ahli Gubernur	3	0	3
3	Asisten Sekretariat Daerah	2	1	3
4	Kepala Biro Sekretariat Daerah	9	0	9
5	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	10	2	12
6	Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah	6	3	9
7	Pejabat Fungsional	73	39	112
8	Staf Sekretariat Daerah	159	134	293
	JUMLAH	263	179	442

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan (data per Juni 2025)

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan jabatan meliputi 1 orang Sekretaris Daerah, 3 orang Staf Ahli Gubernur dengan jenis kelamin laki-laki, 3 orang Asisten Sekretariat Daerah yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, 9 orang Kepala Biro Sekretariat Daerah dengan jenis kelamin laki-laki, 12 orang Kepala Bagian Sekretariat Daerah yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, 9 orang Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, 112 orang Pejabat Fungsional yang terdiri dari 73 orang laki-laki dan 39 orang perempuan dan 293 orang Staf Sekretariat Daerah yang terdiri dari 159 orang laki-laki dan 134 orang perempuan.

Staf Ahli Gubernur meliputi Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum, Politik, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Staf ahli bidang Pembangunan dan Infrastruktur, dan Staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

Asisten Sekretaris Daerah meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro Hukum. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Biro Administrasi Pembangunan. Sedangkan Asisten Administrasi Umum membawahi Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah mengangkat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialis yang dibutuhkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Gubernur. Dimana jumlah tenaga fungsional

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Bila ditinjau dari jenjang pendidikan, maka struktur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (ORANG)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Strata 3	4	0	4
2	Strata 2	82	41	123
3	Strata 1	109	97	206
4	Diploma 4	27	12	39
5	Diploma 3	5	10	15
6	Diploma 2	1	0	1
7	Diploma 1	0	0	0
8	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	34	18	52
9	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1	1	2
10	Sekolah Dasar	0	0	0
	J U M L A H	263	179	442

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan (data per Juni 2025)

Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagian besar berada pada jenjang Strata 1 (S1) yaitu 206 orang atau 46,60 % dari 10 jenjang pendidikan yang ada, yang terdiri dari 109 orang laki-laki dan 97 orang perempuan. Hingga saat ini hanya 4 orang atau 0,90 % yang memiliki latar belakang pendidikan tertinggi yaitu Strata 3 (S3) dengan jenis kelamin laki-laki, 123 orang PNS berlatar belakang pendidikan Strata 2 (S2) yang terdiri dari 82 orang laki-laki dan 41 orang perempuan. Adapun PNS berpendidikan rendah seperti SLTP sebanyak 2 orang atau 0,45 % terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dari total jumlah PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan maupun sub kegiatan dan belum memadainya jumlah PNS yang ada, maka PNS yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dibantu oleh 10 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut dijelaskan data terpilah untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikannya.

Tabel 2.5
Komposisi PPPK Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STRUKTUR ORGANISASI	JENIS KELAMIN		JUMLAH(ORANG)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretaris Daerah	0	0	0
2	Asisten Sekretaris Daerah	0	0	0
3	Staf Ahli	0	0	0
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0	0	0
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	0	0	0
6	Biro Hukum	0	0	0
7	Biro Perekonomian	0	1	1
8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0
9	Biro Administrasi Pembangunan	0	0	0
10	Biro Organisasi	2	1	3
11	Biro Umum	1	2	3
12	Biro Administrasi Pimpinan	3	0	3
	JUMLAH	6	4	10

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan (data per Juni 2025)

Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau tersebar di Biro Perekonomian, Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan.

Pada tabel dibawah ini, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau didominasi Golongan IX, yaitu sebanyak 9 orang, dan 1 orang pada Golongan VII.

Tabel 2.6
Komposisi PPPK Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan

NO	STRUKTUR ORGANISASI	Golongan		JUMLAH (ORANG)
		IX	VII	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-
2	Asisten Sekretaris Daerah	-	-	-
3	Staf Ahli	-	-	-
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-
5	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	-
6	Biro Hukum	-	-	-
7	Biro Perekonomian	1	-	1
8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	-
10	Biro Organisasi	3	-	3
11	Biro Umum	2	1	3
12	Biro Administrasi Pimpinan	3	-	3
	JUMLAH	9	1	10

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan (data per Juni 2025)

Jika ditinjau berdasarkan jenjang jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Komposisi PPPK Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (ORANG)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	3	4
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1	0	1
3	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	2
4	Arsiparis Terampil	1	0	1
5	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	2	0	2
JUMLAH		6	4	10

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan (data per Juni 2025)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan jabatan meliputi Analisis Kebijakan Ahli Pertama sebanyak 4 orang dengan jenis kelamin 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 1 orang dengan berjenis kelamin laki-laki, Arsiparis Ahli Pertama terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, Arsiparis Terampil hanya 1 orang laki-laki dan selanjutnya jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama terdiri dari 2 orang laki-laki.

Bila ditinjau dari jenjang pendidikan, maka struktur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Komposisi PPPK Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (ORANG)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Strata 3	0	0	0
2	Strata 2	0	0	0
3	Strata 1	5	4	9
4	Diploma 4	0	0	0
5	Diploma 3	1	0	1
6	Diploma 2	0	0	0
7	Diploma 1	0	0	0
8	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	0	0	0
9	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	0	0	0
10	Sekolah Dasar	0	0	0
J U M L A H		6	4	10

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan (data per Juni 2025)

Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau didominasi oleh lulusan Starta 1 (S1) yaitu sebanyak 9 orang.

Kemudian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan maupun sub kegiatan dan belum memadainya jumlah PNS yang ada, PNS yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau juga dibantu oleh 538 orang Tenaga Non PNS atau Tenaga Harian Lepas (THL). Berikut dijelaskan data terpilah untuk Tenaga Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikannya.

Tabel 2.9
Komposisi Non PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KETERANGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (ORANG)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	THL pada Sekretaris Daerah	2	5	7
2	THL pada Asisten Sekretaris Daerah			
	a. Asisten I	1	2	3
	b. Asisten II	2	3	5
	c. Asisten III	3	1	4
3	THL pada Staf Ahli	4	4	8
4	THL pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	15	8	23
5	THL pada Biro Kesejahteraan Rakyat	15	22	37
6	THL pada Biro Hukum	9	8	17
7	THL pada Biro Perekonomian	11	14	25
8	THL pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	11	8	19
9	THL pada Biro Administrasi Pembangunan	10	7	17
10	THL pada Biro Organisasi	11	6	17
11	THL pada Biro Umum	147	145	292
12	THL pada Biro Administrasi Pimpinan	30	34	64
	JUMLAH	271	267	538

Sumber : Biro Umum (data per Juni 2025)

Jumlah Tenaga Non PNS atau Tenaga Harian Lepas (THL) Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagian besar berada di Biro Umum sebanyak 292 orang atau sekitar 54,27 % dari total Tenaga Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari 147 orang laki-laki dan 145 orang perempuan. Hal itu dikarenakan Biro umum meliputi beberapa kegiatan teknis yang membutuhkan banyak tenaga karena gabungan dari beberapa fungsi seperti rumah tangga pimpinan, keuangan dan aset serta tata usaha, dan juga untuk mengisi kekosongan pegawai sebagai tenaga teknis seperti supir, pramu saji, pramu wisma, tenaga teknis kelistrikan dan jaringan serta bidang tugas lapangan lainnya. Sedangkan Tenaga Non PNS dengan jumlah paling sedikit terdapat pada sekretariat Asisten I, Asisten II dan Asisten III yaitu jumlahnya masing-masing 3 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan pada

Sekretariat Asisten I. Sedangkan pada pada Sekretariat Asisten II terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dan pada Sekretariat Asisten III terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Secara keseluruhan jumlah Tenaga Non PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah 538 orang yang terdiri dari 271 orang laki-laki dan 267 orang perempuan. Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau jumlah Tenaga Non PNS dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Tenaga Non PNS dengan jenis kelamin perempuan.

Adapun tabel dibawah ini menginformasikan data terkait Tenaga Non PNS ditinjau dari jenjang pendidikan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Komposisi Non PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (ORANG)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Strata 2	4	1	5
2	Strata 1	150	102	252
3	D4	0	0	0
4	D3	5	3	8
5	D2	0	0	0
6	D1	0	0	0
7	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	179	94	273
8	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	0	0	0
9	Sekolah Dasar	0	0	0
J U M L A H		338	200	538

Sumber : Biro Umum (data per Juni 2025)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Tenaga Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan total 538 orang yang didominasi lulusan pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yaitu 273 orang atau 50,74% dari 9 jenjang pendidikan yang ada, yang terdiri dari 179 orang laki-laki dan 94 orang perempuan. Selanjutnya diikuti lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 252 orang yang terdiri dari 150 orang laki-laki dan 102 orang perempuan. Sedangkan Tenaga Non PNS berpendidikan tertinggi yaitu Strata 2 (S2) sebanyak 5 orang dengan jenis kelamin 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dari total jumlah PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumberdaya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan

dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Adapun ketersediaan sumber daya berupa sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rekapitulasi inventaris aset Sekretariat Daerah Provinsi Riau dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Rekapitulasi Inventaris Aset Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Per 31 Desember 2024

No	Jenis Asset	Jumlah (Rp)
1	TANAH	1.349.092.547.430,90
2	PERALATAN MESIN	378.278.918.427,60
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	577.691.729.407,19
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	21.956.603.010,74
5	ASET TETAP LAINNYA	15.124.006.202,25
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1.062.637.309,99
	TOTAL	2.343.206.441.788,67

Sumber : Biro Umum (Data Juni 2025)

Salah satu upaya pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender adalah tersediannya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak dimana harus memenuhi beberapa kriteria antara lain aksesibilitas yang baik, desain mengakomodasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, anak, penyandang disabilitas, ketersediaan fasilitas sesuai standard dan fasilitas yang telah ditentukan, terpelihara dengan baik dan dapat digunakan serta pengelolaannya memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol manfaat serta memenuhi hak tumbuh kembang anak. Pada saat ini, ketersediaan sarana dan prasarana publik layanan responsif gender dan ramah anak di gedung perkantoran di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau seperti kebutuhan ruang laktasi, Taman Penitipan Anak (TPA) atau daycare, ruang bermain anak, toilet ramah lansia, toilet ramah disabilitas, penyediaan kursi roda serta charger area belum tersedia di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Adapun fasilitas yang memenuhi kriteria layanan responsif gender seperti jalur masuk dan lift ramah disabilitas, parkir prioritas, toilet dan tempat wudhu terpisah untuk laki-laki dan perempuan sudah tersedia di gedung perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

A. Capaian Kinerja Indikator Utama dan Capaian Kinerja Kunci

Untuk melihat capaian kinerja indikator utama dan capaian kinerja kunci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	67,11	67,45	67,63	74,63	83,97

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan peningkatan, dimana tahun 2020 dengan nilai 67,11 dan pada tahun 2024 dengan nilai 83.97. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, dengan fokus pada aspek kelembagaan, tata kelola, dan SDM aparat. Peningkatan ini menunjukkan bentuk usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi sehingga menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis

2) Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran indeks profesionalitas ASN bertujuan untuk mengetahui standar profesionalitas, melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya dan akhirnya menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas.

Pemahaman akan Indeks Profesionalitas ASN oleh para pegawai dan pejabat suatu instansi diharapkan mendukung pembenahan kinerja ASN di sebuah unit organisasi guna memenuhi harapan masyarakat. Kualitas

kepemimpinan ASN di berbagai tingkatan level, terutamanya, merupakan bagian dari kualitas sumber daya manusia yang dianggap sebagai faktor penting penentu arah dan tujuan organisasi. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Berikut ini disajikan tabel Indeks Nilai IP ASN Provinsi Riau Tahun 2021-2024 :

Tabel 2.13
Indeks Nilai IP ASN Provinsi Riau Tahun 2021-2024

No	Kabupaten/Kota	Kriteria	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Provinsi Riau	Kualifikasi (25)	14.12	21,61	21.92	21.96
		Kompetensi (40)	8.72	17,06	26.01	25.38
		Kinerja (30)	24.56	24,66	25.02	24.28
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	52.40	68,33	77.96	76.62
2	Kuantan Singingi	Kualifikasi (25)	12,6	21,18	20.26	20.40
		Kompetensi (40)	9,61	10,07	25.41	25.73
		Kinerja (30)	15,22	9,99	22.39	23.66
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	42,43	46,24	73,06	74.79
3	Indragiri Hulu	Kualifikasi (25)	12,14	21,14	20.66	20.80
		Kompetensi (40)	8,73	9,73	23.87	28.68
		Kinerja (30)	24,4	24,16	21.48	26.70
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	50,2	60,03	71,01	81.18
4	Indragiri Hilir	Kualifikasi (25)	12,79	21,16	20.53	20.66
		Kompetensi (40)	14,64	14,73	24.8	26.97
		Kinerja (30)	24,63	23,42	22.22	23.93
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	57,06	64,31	72,56	76.56
5	Pelalawan	Kualifikasi (25)	13,6	21,22	20.94	20.96
		Kompetensi (40)	9,87	12,07	25.83	26.95
		Kinerja (30)	24,98	24,88	23.43	23.80
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	53,36	63,17	75,2	76.71
6	Siak	Kualifikasi (25)	13,09	20,76	21.25	21.06
		Kompetensi (40)	9,3	9,51	24.79	25.96
		Kinerja (30)	24,42	5,12	23.66	24.44
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	51,81	39,39	74,71	76.46
7	Kampar	Kualifikasi (25)	13,15	21,36	20.36	20.49
		Kompetensi (40)	13,5	11,22	26.83	24.21
		Kinerja (30)	22,83	17,02	23.98	20.83
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	54,48	54,6	76,18	70.53

No	Kabupaten/Kota	Kriteria	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
8	Rokan Hulu	Kualifikasi (25)	12,55	21,04	20.66	20.64
		Kompetensi (40)	9,87	9,64	23.87	26.03
		Kinerja (30)	17,96	6,83	21.48	23.96
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	45,38	42,51	71,01	75.63
9	Bengkalis	Kualifikasi (25)	12,46	21,23	21.09	21.03
		Kompetensi (40)	8,79	8,39	25.55	26.81
		Kinerja (30)	24,76	6,6	24.2	25.35
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	51	41,22	75,84	78.19
10	Rokan Hilir	Kualifikasi (25)	12,54	21,16	20.98	20.92
		Kompetensi (40)	8,99	9,65	25.11	23.87
		Kinerja (30)	23,93	18,84	23.69	21.53
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	50,46	54,65	74,78	71.32
11	Kepulauan Meranti	Kualifikasi (25)	12,36	21,12	21.00	20.98
		Kompetensi (40)	9,06	6,98	25.37	26.34
		Kinerja (30)	22,94	12,41	24.75	25.45
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	49,36	45,51	76,12	77.77
12	Kota Pekanbaru	Kualifikasi (25)	13,41	21,21	21.3	21.35
		Kompetensi (40)	16,6	29,08	25.68	25.52
		Kinerja (30)	23,69	23,09	24.17	23.87
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	58,69	58,69	76,09	75.74
13	Kota Dumai	Kualifikasi (25)	13,38	21,33	21.33	21.36
		Kompetensi (40)	10,15	11,25	27.9	27.58
		Kinerja (30)	24,93	24,55	25.36	25.43
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	53,45	62,13	79,59	79.37
TOTAL		Kualifikasi (25)	13	21	20,94	20.97
		Kompetensi (40)	10,58	12,26	25,46	26.15
		Kinerja (30)	23,02	17,04	23,53	24.09
		Disiplin (5)	5	5	5	5
		Total Nilai IP	51,54	53,91	74,93	76.22

Sumber: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Perkembangan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Riau dalam 4 Tahun terakhir (2021 s.d 2024) telah menunjukkan Perkembangan membaik dari kategori sangat rendah (51,54) menjadi sedang (76,22). Terdapat 4 dimensi pembentuk IP ASN, dari ke 4 dimensi tersebut dimensi kompetensi yang mengalami peningkatan yang paling besar mulai dari tahun 2021 sebesar 10,58 poin, tahun 2022 sebesar 12,26 poin, tahun 2023 sebesar 25,46 poin, dan tahun 2024 sebesar 26,97 poin.

3) Indeks Sistem Merit

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN penting karena dapat meningkatkan kinerja, motivasi dan akuntabilitas ASN. Selain itu, sistem merit juga dapat meningkatkan efektivitas birokrasi dan kepercayaan masyarakat.

Adapun tujuan penerapan Sistem Merit yaitu memastikan jabatan yang ada pada birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku. Penerapan Sistem merit dilakukan dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah dimulai dari perencanaan kebutuhan SDM sampai dengan pensiun.

Tabel 2.14
Indeks Sistem Merit Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Aspek	Bobot	Skor Maks	2019		2020		2022		2023		2024	
			Skor	%	Skor	%	Skor	%	Skor	%	Skor	%
Perencanaan Kebutuhan	10	40	25	62,5	40	100	37,5	93,8	40	100	40	100
Pengadaan	10	40	24	60	34	85	36	90	38	95	38	95
Pengembangan Karir	30	120	45	37,5	70	58,3	75	62,5	85	70,8	80	66,7
Promosi dan Mutasi	10	40	15	37,5	15	37,5	17,5	43,8	20	50	20	50
Manajemen Kinerja	20	80	60	75	70	87,5	62,5	78,1	60	75	72,5	90,6
Penggajian, Penghargaan, Disiplin	10	40	32,5	81,3	32,5	81,3	40	100	40	100	40	100
Perlindungan dan Pelayanan	4	16	8	50	14	87,5	14	87,5	16	100	16	100
Sistem Informasi	6	24	18	75	18	75	18	75	19	79,2	19	79,2
Total	100	400	227,5	Krg	293,5	Baik	300,5	Baik	318,0	Baik	325,5	Sangat Baik

Sumber: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Berdasarkan data di atas, hasil penilaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, skor Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Riau masih berada pada kategori "Kurang" dengan nilai 227,5. Namun, pada tahun 2024, skornya meningkat menjadi 325,5 dan masuk kategori "Sangat Baik".

Aspek promosi dan mutasi merupakan aspek dengan nilai terendah secara konsisten sejak tahun 2019. Berdasarkan catatan dari KASN sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 490 tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Penyebab rendahnya kinerja aspek promosi dan mutasi dalam Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Riau adalah Belum adanya penyalarskan kebijakan internal tentang pola karir, promosi dan mutasi, serta manajemen talenta dengan ketentuan pola karir nasional dan kebijakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang masih belum menerapkan mekanisme manajemen talenta.

4) Nilai Survei Indeks Berakhlak

Nilai-nilai dasar atau yang dikenal sebagai Core Values ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dan diluncurkan dengan tujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di Indonesia. Dimana Indeks BerAKHLAK yang ada merupakan indikator yang digunakan untuk memonitor dan mentransmisikan implementasi budaya kerja ASN sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Sehingga dengan Core Values ASN “BerAKHLAK” yang ada diharapkan ASN yang ada bisa meimplementasikan budaya kerja yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam mewujudkan ASN yang Profesional dan Tatakelolah Pemerintahan yang baik. Adapun perkembangan nilai survey Indeks BerAKHLAK Provinsi Riau dari tahun 2023 sebesar 59,9 point meningkat pada tahun 2024 sebesar 69,4 point dengan kriteria kategori cukup sehat. Perkembangan nilai survey Indeks BerAKHLAK Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Perkembangan Survey Nilai Indes BerAKHLAK Provinsi Riau
Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Nilai Survei Indeks Berakhlak	58,3	59,9	69,66

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

5) Survey Penilaian Integritas

Selain Kinerja integritas Provinsi Riau digambarkan dari perilaku individu terhadap aktivitas sehari-hari dalam menjalankan kewajiban baik sebagai pengambil kebijakan maupun pelaksana yang ada, kinerja integritas Provinsi Riau juga digambarkan secara organisasi dengan penilaian oleh KPK melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) ini merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK untuk meningkatkan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Survei ini menyoar pegawai pemerintahan, pengguna layanan publik, serta para ahli dan pakar, dengan tujuan untuk memetakan celah korupsi yang terjadi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil dari survei ini akan digunakan sebagai bahan rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi.

Capaian Survey Penilaian Integritas untuk Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebesar 62,83 nilai ini bila dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan penurunan sebanyak 5,98. Tujuan dari pelaksanaan survey penilaian integritas ini adalah meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistim anti-korupsi yang mana hasil survey tersebut akan menjadi rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi. Indikator pengukuran survey penilaian integritas ini adalah : 8 Menu Monitoring Center for Prevention (MCP), Sosialisasi/ Kampanye, Stranas PK, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan Audit persen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan

Tabel 2.16
Perkembangan Hasil Penilaian Integritas Pemerintah
Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Survey Penilaian Integritas	66,10	64,16	68,81	62,83

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

6) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam

penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Provinsi Riau, maka perlu diselenggarakan survey pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Hasil nilai SKM yang ada didapat dari nilai rata rata SKM yang dilakukan oleh masing masing perangkat daerah dan dilaporkan kepada Biro Organisasi. Perkembangan hasil nilai SKM yang ada sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan, dengan nilai rata rata 86,1 , tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan, dengan nilai rata rata 89,93, tahun 2023 terdapat 8 (delapan) Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan, dengan nilai rata rata 88,43 dan pada tahun 2024 terdapat 15 (limabelas) Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan, dengan nilai rata rata 86,32. Penurunan nilai SKM yang ada dikarenakan peningkatan terhadap penyampaian pelaporan dari Perangkat Daerah yang ada, dimana diharapkan semua Perangkat Daerah untuk bisa sudah menyampaikan laporan SKM sebagai gambaran penilaian kepuasan dari masyarakat terhadap kinerja dari Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Adapun perkembangan nilai SKM yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Perkembangan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Provinsi Riau
Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86,1	89,3	88,43	86,11

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

7) Capaian akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diukur dengan 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja, capaian kinerja SAKIP Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.18
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Riau
Tahun 2020 - 2024

KOMPONEN	BOBOT	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	22,86	22,86	23.25	23.78	23.80
Pengukuran Kinerja	25	14,15	14.41	20.51	20.91	20.91
Pelaporan Kinerja	15	11,08	11,22	10.31	10.60	10.67
Evaluasi Internal	10	6,9	7,05	15.10	15.22	15.84
Capaian Kinerja	20	13,08	13,13	-	-	-
Nilai SAKIP (Predikat)	100	67,82	68,67	69.17	70.51	71.22
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	BB	BB

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Riau untuk tahun 2024 dengan nilai 71.22 dengan predikat BB atau Sangat Baik, terus meningkat dari tahun 2020 dengan nilai 67.82 dengan predikat B atau Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dn berbasis teknologi informasi.

8) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dilakukan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya dalam mempertahankan maupun meningkatkan indikator layanan bidang urusan komunikasi dan informatika. Adapun indikator layanan bidang urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,51	2,55	3,00	3,01	3,75

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Pemantauan dan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator. Indeks SPBE di Provinsi Riau pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 0,74 Poin jika dibanding dari Tahun 2023 dengan indeks 3.01, hal ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen dalam peningkatan SPBE. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, aspek perencanaan strategis SPBE, aspek penyelenggara SPBE, aspek penerapan manajemen SPBE, aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, aspek layanan publik berbasis elektronik. Secara keseluruhan 4 domain mengalami peningkatan namun perlu ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.

9) Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik disusun dan dilaksanakan secara baik, berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang berkualitas. Indeks ini biasanya digunakan dalam konteks evaluasi kinerja pemerintahan, khususnya dalam reformasi birokrasi dan perencanaan pembangunan. Untuk Provinsi Riau belum berpartisipasi dalam pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

10) Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan efektivitas pelaksanaan reformasi hukum di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Indeks ini dikembangkan dalam rangka mendorong terwujudnya sistem hukum nasional yang adil, bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam agenda reformasi birokrasi dan pembangunan hukum nasional.

Tabel 2.20
Indeks Reformasi Hukum Provinsi Riau Tahun 2023-2024

Indikator	Tahun	
	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	55,93	87,5

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

11) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.21
Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	3,61	3,68	3,62	4,04	4,12

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) mengalami peningkatan dalam rentang waktu tahun 2022 – 2024.

12) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik merupakan ukuran sejauh mana instansi pemerintah mematuhi dan menerapkan standar pelayanan publik mengacu pada sejauh mana unit penyelenggara pelayanan: Menyusun dan menetapkan standar pelayanan, Menyediakan informasi pelayanan secara terbuka dan mudah diakses, Melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan, dan Melaksanakan pelayanan sesuai standar

yang telah ditetapkan. Untuk melihat Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Provinsi Riau Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Provinsi Riau
Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	98,12	90,03	88,16	96,47

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

13) Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara transparan, akuntabel, dan efisien di lingkungan instansi pemerintah. Indeks ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas belanja pemerintah. Perkembangan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi Riau Tahun 2021-2024.

Tabel 2.23
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Tata Kelola Pengadaan	70	82,69	71,6	72,01	75,66

Sumber : LKPP

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan mengalami peningkatan dalam rentang waktu tahun 2021–2024, Peningkatan ini menunjukkan perbaikan yang nyata dalam penggunaan sistem elektronik (SiRUP, e-Tendering, e-Kontrak), peningkatan kompetensi SDM PBJ, dan pematangan UKPBJ di tingkat provinsi.

14) Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi pemerintahan. Ini menunjukkan tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian dan untuk

meningkatkan kualitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP telah menyiapkan pedoman penilaian maturitas SPIP melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Perkembangan Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Riau Tahun 2021-2024.

Tabel 2.24
Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3,17	3,39

Sumber : Kemenpan RB RI

15) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Riau, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi Riau Tahun 2020 - 2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Nilai LPPD	3,15	3,47	3,47	3,2553

Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Prestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau, dari tahun 2020 sampai tahun 2021 menunjukkan peningkatan kinerja, dimana prestasi kinerja tahun 2020 sebesar 3,15 meningkat menjadi 3,47 pada tahun 2021.

16) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistim pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inovasi Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2018 yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kemajuan daerah dalam penerapan hasil riset dan inovasi di daerah. IID merupakan 1 (satu) dari 4 pengukuran kinerja pemerintah daerah, selain Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

(IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

Perhitungan indeks inovasi daerah mengalami kenaikan nilai setiap tahun. Pada tahun 2023 Nilai Indeks Inovasi Provinsi Riau sebesar 53,52 dengan kategori Inovatif peringkat 15 dan pada tahun 2024 secara peringkat Provinsi Riau mengalami penurunan namun secara nilai dan kategori mengalami kenaikan menjadi 68,34 dengan kategori Sangat Inovatif peringkat 18.

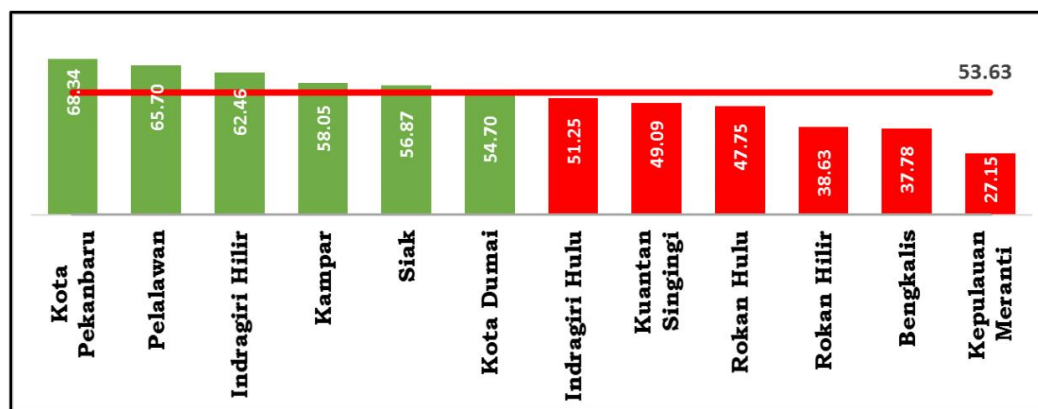
Tabel 2.26
Indeks Inovasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Indeks Inovasi (Nilai)	3078 (Total Score)	38,82	50,94	53,52	68,34
2	Kategori	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif
3	Peringkat	15	26	16	15	18

Sumber: KemenPANRB Tahun 2025

Perhitungan indeks inovasi daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 terdapat 6 Kabupaten/Kota yang ada diatas nilai Provinsi yaitu Kota Pekanbaru 68,34 Sangat Inovatif, Pelalawan 65,70 Sangat Inovatif, Indragiri Hilir 62,46 Sangat Inovatif, Kampar 58,05 Inovatif, Siak 56,87 Inovatif dan Kota Dumai 54,79 Inovatif. Kota Pekanbaru merupakan Kota dengan Indeks Inovasi tertinggi dengan nilai 68,34 kategori Sangat Inovatif dan terendah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai kategori Kurang Inovatif.

Gambar 2.2
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Perhitungan indeks inovasi daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 terdapat 6 Kabupaten/Kota yang ada diatas nilai Provinsi yaitu Kota Pekanbaru 68,34 Sangat Inovatif, Pelalawan 65,70 Sangat Inovatif, Indragiri

Hilir 62,46 Sangat Inovatif, Kampar 58,05 Inovatif, Siak 56,87 Inovatif dan Kota Dumai 54,79 Inovatif. Kota Pekanbaru merupakan Kota dengan Indeks Inovasi tertinggi dengan nilai 68,34 kategori Sangat Inovatif dan terendah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai kategori Kurang Inovatif.

B. Kerjasama Pembangunan Daerah

Dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan di semua bidang, Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan kerjasama, baik antar pemerintah maupun dengan swasta.

Untuk melihat jumlah kerjasama yang sudah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.27
Kerjasama Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2024

NO	JENIS KERJA SAMA	2021	2022	2023	2024
1	Data Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain	17	29	21	8
2	Sinergi Perencanaan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah	6	8	15	-
3	Data Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga	13	27	29	65

Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

C. Capaian Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah

Tabel 2.28

Evaluasi Renstar 2020-2024

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Adapun Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur
Sebagai pimpinan daerah, mereka adalah pengguna utama layanan Setda dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintahan, administrasi, dan koordinasi.
- b. Perangkat Daerah Provinsi
Setda memberikan dukungan administratif, koordinasi kebijakan, dan fasilitasi lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
- c. DPRD Provinsi
Dalam hal koordinasi, fasilitasi hubungan eksekutif dan legislatif, serta penyusunan kebijakan daerah.
- d. Instansi Vertikal dan Lembaga Lain
Termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, BPK, dan lembaga pemerintah pusat yang beroperasi di wilayah provinsi.
- e. Masyarakat Umum
Sebagai penerima manfaat akhir dari kebijakan, layanan, dan program-program yang difasilitasi Setda, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
- f. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sebagai bagian dari sistem birokrasi yang mendapatkan layanan administrasi, kepegawaian, hingga pengelolaan tata usaha.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2021, tentang Hubungan Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, mitra Sekretariat Daerah dalam pemberian layanan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.3 Bagan Hubungan Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau



Keterangan:
 1. Mekanisme pola hubungan kerja digambarkan garis —————
 1. Mekanisme pola koordinasi digambarkan garis - - - - -

2.1.6. Dukungan Bumd Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

A. PT. Bank Riau Kepri

Core Bisnis : Perbankan dan Kondisi saat ini Sehat

B. PT. Jamkrida Riau

Core Bisnis: Penjaminan Kredit dan Penjaminan Garansi dan Kondisi saat ini Sehat

C. PT Permodalan Ekonomi Rakyat

Core Bisnis :

- a. Melakukan bantuan permodalan dan penyertaan modal, memberikan jasa pembiayaan, jasa manajemen untuk pengembangan usaha mikro.
- b. Pengelolaan dana – dana pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi baik yang berasal dari Pemerintah maupun swasta termasuk kegiatan pelatihan, training, penelitian dan sebagainya.
- c. Pelaksanaan program redistribusi aset produktif di Provinsi Riau melalui mekanisme yang disesuaikan dengan azas bisnis.

Kondisi saat ini Sehat.

D. PT. Pengembangan Investasi Riau

Core Bisnis:

- a. Menggalang Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota dengan swasta dan lembaga keuangan Nasional, Internasional dan pihak lain guna menghimpun dana untuk biaya bidang usaha komersial strategis dan saling menguntungkan.
- b. Melaksanakan berbagai proyek-proyek infrastruktur, dan industri dasar dan lain-lain yang komersial, berkualitas tinggi dan jangka panjang yang melibatkan satu atau lebih kabupaten/kota.
- c. Bertindak sebagai mitralokal investor dalam maupun luar negeri sehingga dapat membantu kelancaran usaha baik dalam bentuk perizinan maupun fasilitas lainnya.
- d. Meningkatkan kepercayaan pemilik modal dalam mengembangkan usaha investasi di Riau sehingga dapat mempercepat pemenuhan/penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dan industri dasar bagi pemerintah, masyarakat dan swasta.

PT Pengembangan Investasi Riau memiliki 4 anak perusahaan yaitu:

- a. PT. Riau Power
- b. PT. Riau Power Dua

- c. PT. Riau Multi Trade
- d. PT. Tanara Gagas Kreasi
- e. Untuk ke 4 anak perusahaan PT Pengembangan Investasi Riau tersebut pada kondisi saat ini **Tidak Sehat**.

E. PT. Sarana Pembangunan Riau

Core Bisnis:

- a. Perhotelan
- b. Hiburan
- c. Jasa angkutan
- d. Pergerakan Industri Pekerjaan Hasil Jasa kontruksi dan alat berat.
- e. Pengadaan barang dan Jasa
- f. Pertambangan
- g. Real Estate
- h. Energi terbarukan
- i. Agribisnis
- j. Perdagangan
- k. SPAM.

Kondisi saat ini Sehat

F. PT. Riau Petroleum

Core Bisnis:

- a. Melakukan usaha pengembangan (ekplorasi dan eksploitasi) minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan.
- b. Melakukan usaha pengelolaan, pengangkutan dan penjualan minyak dan gas bumi serta industri petro kimia.
- c. Melakukan usaha pendistribusian bahan bakar minyak dan gas.

Kondisi saat ini.

- a. Pada saat ini PT Riau Petroleum melalui anak perusahaan PT. Riau Petroleum Siak sedang menunggu Pengurusan PI (*participating interst*) 10% untuk Wilayah Kerja Siak sampai saat ini prosenya tersebut sudah berada di PHE Siak untuk disampaikan ke SKK Migas dan selanjutnya ditetapkan oleh Kementerian ESDM Republik Indonesia.
- b. Untuk Wilayah Kerja WK Kampar – WK Rokan sudah menyampaikan proses penawaran PI 10% kepada SKK Migas.
- c. Untuk Pengelolaan Wilayah Kerja Mahato Pemerintah Provinsi Riau sudah menyatakan Minat untuk Mengelola PI 10% dan saat ini sudah dilakukan

kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sudah disampaikan kepada SKK Migas.

G. PT. Riau Airline

Kondisi Saat ini sudah tidak beroperasi sejak tanggal 5 April 2011 sesuai dengan Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor Au.009/3/13.DRJU-2012 tanggal 16 April 2012 perihal Surat Izin Usaha Udara Angkutan Niaga PT Ral yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 7 April 2012 Surat izin Usaha angkutan Udara Niaga berjadwal Nomor SKEP/137/VII/2022 tanggal 10 Juli tidak berlaku dan tidak terdaftar lagi sebagai pemegang surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak dapat memberikan Perpanjangan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal PT RAL.

Untuk dapat melihat Realisasi Penerimaan Deviden BUMD Provinsi Riau dari Tahun 2001 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini

2.1.7. Data Perkembangan Kerjasama Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan rekapitulasi dokumen kerjasama yg sudah difasilitasi, pada periode 2020 - 2022 data menunjukkan trend peningkatan secara kuantitatif. Pada tahun 2021 dokumen kerjasama yang difasilitasi berjumlah 33 kerjasama. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun 2021 menjadi 58 kerjasama. Sementara untuk semester I tahun 2022 telah difasilitasi sebanyak 25 usulan kerjasama dan sudah ada beberapa usulan lagi yang akan diagendakan pembahasannya.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan yg positif ini antara lain terkait dengan:

a. Penguatan Regulasi.

Diwujudkan dengan dukungan kebijakan baik secara nasional maupun dalam lingkup internal Pemprov Riau. Secara nasional, kerjasama daerah didorong dan diatur dengan regulasi sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang at Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
4. Menerbitkan SK pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD)

5. Menerbitkan Surat Edaran yang menetapkan bahwa setiap usulan kerjasama Daerah oleh OPD harus diajukan melalui Biro Pemerintahan dan Otda dan diproses oleh TKKSD.

b. Penguatan Kelembagaan.

Antara lain dengan:

1. Dibentuk dan diaktifkannya fungsi TKKSD dalam memproses rencana kerjasama Daerah, melalui SK Gubernur Riau
2. Ditetapkannya Biro Pemerintahan dan Otda sebagai unit pelayan satu pintu utk memfasilitasi kerjasama Daerah melalui SE Sekdaprov Riau.

c. Penguatan Koordinasi.

SK Gubernur tentang pembentukan TKKSD dan SE Sekdaprov tentang penetapan pelayanan satu pintu utk kerjasama Daerah semakin meningkatkan pemahaman OPD tentang prosedur pelaksanaan kerjasama Daerah, yang sekaligus menyebabkan terbangunnya penguatan koordinasi antara OPD dan Biro Pem/Otda selaku Sekretariat TKKSD.

Penyelenggaraan kerjasama daerah, berpedoman kepada Dokumen RPJMD tahun 2019-2024 yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan daerah. Untuk Objek dan Ruang Lingkup berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rekap fasilitasi Kerjasama daerah Provinsi Riau tahun 2020-2022 dapat dilihat pada lampiran.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Sebagai unsur staf yang memiliki fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif terhadap seluruh organisasi perangkat daerah serta pimpinan daerah, Sekretariat Daerah memegang peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan internal yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan serta kebijakan strategis kepala daerah.

Namun demikian, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan dan kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis-administratif, tetapi juga menyangkut kelembagaan, sumber daya

manusia, sistem kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta keterpaduan dalam pengelolaan kebijakan lintas sektor.

Identifikasi permasalahan ini menjadi penting sebagai dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Dengan mengidentifikasi akar masalah secara objektif dan menyeluruh, diharapkan perencanaan pembangunan kelembagaan Sekretariat Daerah ke depan dapat lebih terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 2.29
Pemetaan Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Daerah	Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Belum Optimalnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Bina Mental Spiritual
		Belum Optimalnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dasar
		Belum Optimalnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang non pelayanan dasar
	Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Belum Optimalnya kualitas pengelolaan kebijakan perekonomian
		Belum Optimalnya kualitas pengelolaan kebijakan Sumber Daya Alam
	Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Belum Optimalnya Kualitas Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Belum Optimalnya Kualitas Pelaporan Pembangunan		
Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Belum Optimalnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Umum	
	Belum Optimalnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	
Belum Optimalnya Kualitas Kerjasama Pembangunan	Belum Optimalnya Kualitas Kerjasama Daerah	
Belum Optimalnya kinerja BLUD dan BUMD	Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Belum Optimalnya kualitas Pengelolaan BUMD dan BLUD

Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum Optimalnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Belum Optimalnya Pengadaan barang/Jasa yang Berkualitas	
		Belum Optimalnya Efektivitas Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	
		Belum Optimalnya Efektivitas Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa	
	Belum Optimalnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	Belum Optimalnya kualitas kebijakan produk hukum daerah	
		Belum Optimalnya kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan hukum litigasi, non litigasi dan HAM	
	Belum Optimalnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Belum Optimalnya efektifitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Daerah	
		Belum Optimalnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Daerah	
	Belum Optimalnya Akuntabilitas Sekretariat Daerah	Belum Optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	
	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan	Belum Optimalnya kualitas pelaksanaan administrasi keuangan
			Belum Optimalnya kualitas pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah
			Belum Optimalnya kualitas pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah
			Belum Optimalnya pelaksanaan administrasi umum Sekretariat Daerah
			Belum Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Belum Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Belum Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Belum Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Pimpinan			Belum Optimalnya Pelayanan
	Belum Optimalnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		
	Belum Optimalnya Fasilitasi Keprotokolan		
Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Belum Optimalnya Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Belum Optimalnya Koordinasi dalam Penyelesaian batas	
		Belum Optimalnya penyelesaian batas daerah	
		Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi	

A. Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Belum optimalnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni belum optimalnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa, belum optimalnya kualitas produk hukum yang dihasilkan, belum optimalnya tata kelola organisasi pemerintah daerah, belum optimalnya akuntabilitas sekretariat daerah, belum optimalnya kualitas pelayanan sekretariat daerah dan belum optimalnya kualitas pelayanan pimpinan.

B. Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Daerah

Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah dipengaruhi oleh faktor belum optimalnya kualitas kebijakan di berbagai bidang seperti bidang kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian dan pemanfaatan potensi sda, bidang administrasi pembangunan, bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

C. Belum Optimalnya Kualitas Kerjasama Pembangunan

Belum optimalnya kualitas kerjasama pembangunan dipengaruhi oleh faktor belum optimalnya kualitas kerjasama daerah.

D. Belum Optimalnya kinerja BLUD dan BUMD

Belum Optimalnya kinerja BLUD dan BUMD dipengaruhi oleh Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan.

E. Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Belum optimalnya pengelolaan kawasan perbatasan dipengaruhi oleh faktor belum optimalnya pemanfaatan kawasan perbatasan.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah Daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang dengan terjalannya koordinasi yang baik antar wilayah dan antar sektor. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk merumuskan Isu Strategis menggunakan tabel dibawah ini:

Tabel 2.30
Analisis Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Daerah	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belum Optimal	Open Government Partnership (OGP) yang mendorong keterbukaan birokrasi dan pemerintahan yang lebih partisipatif	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
Leading Sector Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum Optimalnya Kualitas Kerjasama Pembangunan			Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efisien dan Akuntabel		
	Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
	Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Perbatasan					

A. Isu Global

Open Government Partnership (OGP) yang mendorong keterbukaan birokrasi dan pemerintahan yang lebih partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui keterlibatan aktif masyarakat sipil dan pemengku kepentingan.

B. Isu Nasional

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efisien dan Akuntabel

C. Isu Provinsi Riau

Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan permasalahan, isu global, isu nasional dan isu provinsi riau yang menjadi Isu Strategis Sekretariat Daerah adalah ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”***

BAB III

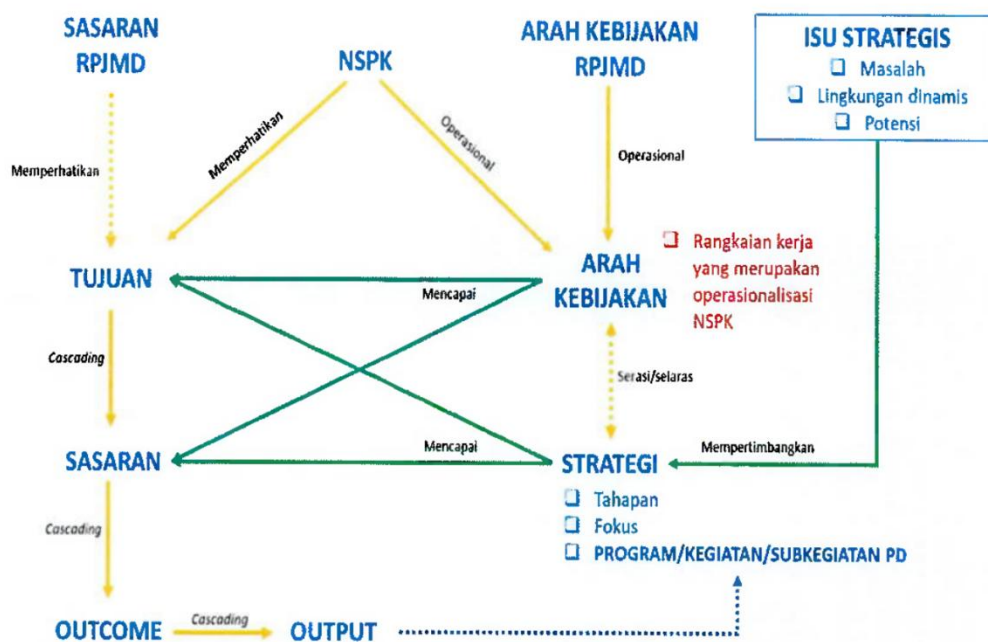
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi serta melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat Daerah ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan.

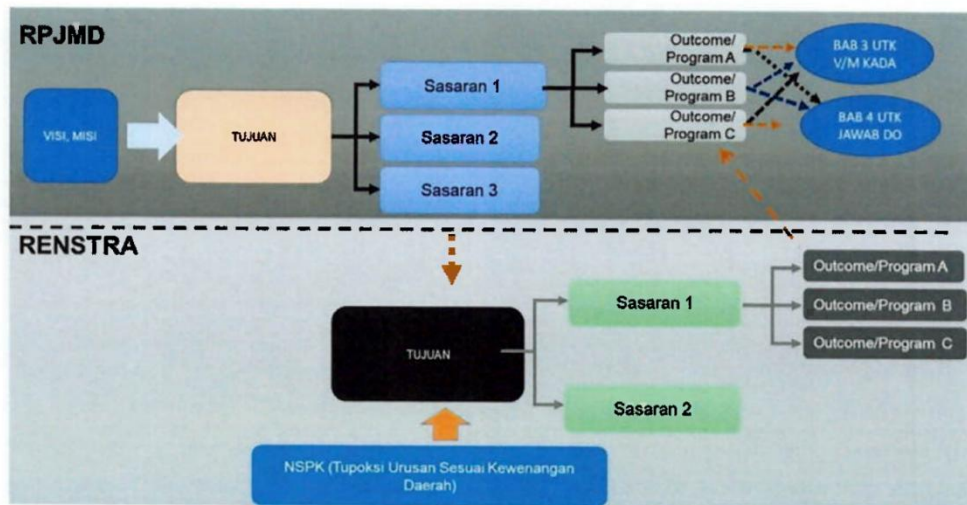
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Gambar 3.1
Konsep Renstra PD



Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
SASARAN RPJMD :	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	83,97	84,65	84,74	84,83	84,91	85,00	85,09	
1.1.1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat		Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Skor	n/a	65	68	70	73	75	78	
7.1.2 Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman		Meningkatnya kinerja BLUD dan BUMD	Persentase BLUD yang berkinerja baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2.1.1 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah			Persentase BUMD yang berkinerja baik	Persentase	100	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	
5.1.1 Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	75,66	74	74,3	74,5	74,6	74,8	75	
5.1.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan			Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,5	84,00	84,30	84,80	85,00	85,50	86,00	
6.1.2 Meningkatkan Kerjasama Pembangunan			Nilai SAKIP	Nilai	60,1	60,75	61,40	62,05	62,70	63,35	64,00	
			Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,12	4,13	4,14	4,15	4,16	4,17	4,18	
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	96,47	95,50	96,60	96,70	96,80	96,90	97,00	
			Nilai Survey Indeks Berakhlak	Poin	69,66	71,52	73,64	75,00	76,00	77,00	78,00	
			Nilai LPPD	Nilai	3,2553*	Tinggi (3,41)	Tinggi (3,41)	Tinggi (3,41)	Tinggi (3,41)	Tinggi (3,41)	Tinggi (3,41)	
		Meningkatnya Kualitas Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang sudah dilaksanakan	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	100	
		Terkelolanya Kawasan Perbatasan	Persentase kawasan perbatasan yang dikelola	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Catatan:
* Data 2023

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Penentuan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran Sekretariat Daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Setelah dirumuskan, maka setiap pentahapan Renstra Sekretariat Daerah dipetakan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun, pentahapan Renstra Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah yang disusun dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah ini dapat dijadikan tema/fokus pembangunan tahun berkenaan, lebih jelas dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Konsolidasi Kelembagaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Layanan Administrasi	Integrasi Sistem Digital dan SPBE	Responsivitas dan Adaptivitas Kebijakan	Kelembagaan Tata Kelola yang Berkelanjutan

Fokus Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahap Pertama (2026)

Fokus Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahap Awal Renstra ini adalah untuk Penguatan Dasar dan Konsolidasi Kelembagaan dengan melakukan Evaluasi sistem tata kelola pemerintahan, Penyempurnaan struktur, SOP, dan peta proses bisnis Setda, Penyusunan Roadmap RB & SPBE dan Penguatan koordinasi lintas OPD.

Fokus Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahap Kedua (2027)

Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahap Kedua Renstra ini untuk Peningkatan Akuntabilitas dan Layanan Administrasi dengan melakukan Implementasi SAKIP berbasis hasil, Pelatihan ASN dalam RB, SAKIP, dan pelayanan publik, Peningkatan efektivitas pelaporan dan Monev dan Digitalisasi layanan administrasi dasar (persuratan, SDM, keuangan).

Fokus Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahap Ketiga (2028)

Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahap Ketiga Renstra ini untuk Integrasi Sistem Digital dan SPBE dengan melakukan Implementasi SPBE antar-OPD, Integrasi sistem informasi perencanaan, keuangan, dan pengawasan, Penguatan satu data daerah dan dashboard tata kelola dan Pelayanan pengaduan digital dan keterbukaan informasi.

Fokus Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahap Keempat (2029)

Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahap Keempat Renstra ini untuk Responsivitas dan Adaptivitas Kebijakan dengan melakukan Penggunaan data dalam pengambilan kebijakan (evidence-based policy), Forum masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan, Evaluasi tematik kebijakan (inflasi, stunting, kemiskinan) dan Kolaborasi multipihak.

Fokus Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahap Kelima (2030)

Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahap Akhir Renstra ini untuk Kelembagaan Tata Kelola yang Berkelanjutan dengan melakukan Penetapan standar minimal layanan lintas OPD, Institusionalisasi praktik baik RB/SPBE, Sistem insentif berbasis kinerja dan inovasi dan Penyusunan Renstra baru berbasis hasil evaluasi 5 tahun.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD			
Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
NSPK Reformasi Birokrasi	Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN	Memperkuat Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	
NSPK Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
NSPK Pelayanan Administrasi Pemerintahan		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	

BAB IV

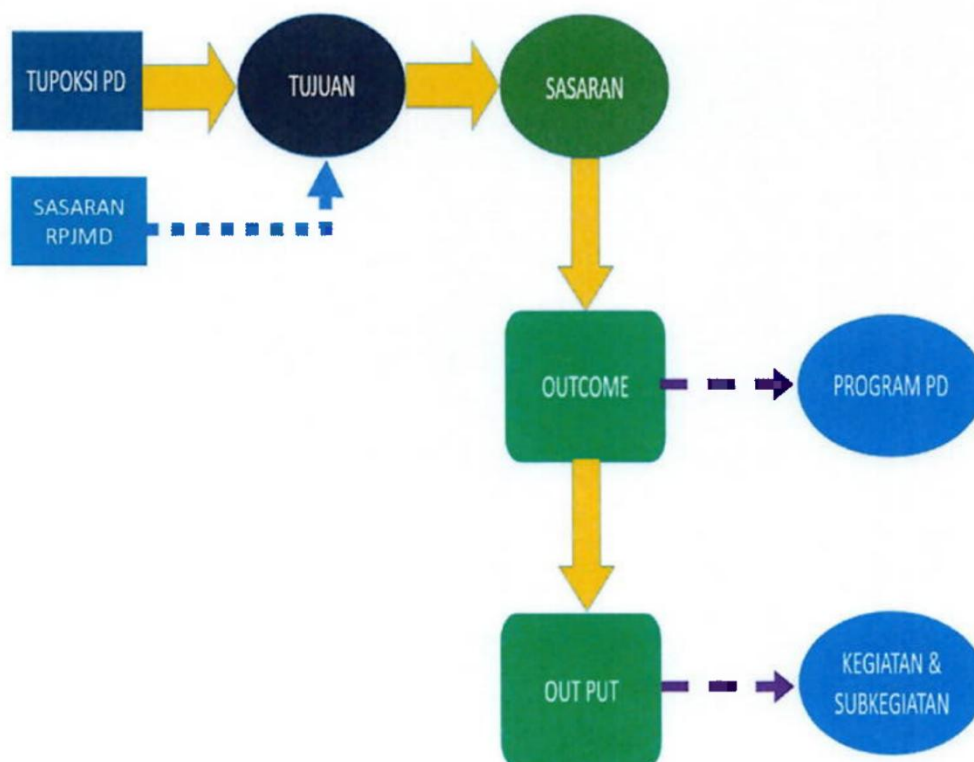
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Sekretariat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh hasil yang terukur. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran program dan menghasilkan keluaran tertentu. Subkegiatan adalah rincian lebih lanjut dari kegiatan yang merupakan satu kesatuan tugas untuk menghasilkan satu keluaran yang mendukung pencapaian hasil kegiatan.

Adapun Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra PD dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra PD





Adapun Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN RPJMD :	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien				Indeks Reformasi Birokrasi		
1.1.1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat		Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah			Indeks Kualitas Kebijakan (Bidang Kesejahteraan Rakyat)		
7.1.2 Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.1.1 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah				Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Bina Mental Spiritual	Persentase Pembinaan Mental Spiritual yang difasilitasi	4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
5.1.1 Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional				Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	
5.1.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel				Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	
6.1.2 Meningkatnya Kerjasama Pembangunan				Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang difasilitasi	4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang non pelayanan dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang difasilitasi	4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		
		Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah			Indeks Kualitas Kebijakan (Bidang Perekonomian dan Pemanfaatan Potensi SDA)			
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
				Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan perekonomian	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian yang dikelola	4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		
				Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		
				Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		
				Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang dikelola	4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		
		Meningkatnya kinerja BLUD dan BUMD			Persentase BLUD yang berkinerja baik Persentase BUMD yang berkinerja baik			
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
				Meningkatkan kualitas Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang dikelola	4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		
		Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah			Indeks Kualitas Kebijakan (Bidang Administrasi Pembangunan)			
			Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Kualitas Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Pembangunan	4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
				Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	
				Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	
				Meningkatnya Kualitas Pelaporan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaporkan	4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	
				Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Tingkat Kematangan UKPBJ	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN	
				Meningkatnya Pengadaan barang/Jasa yang Berkualitas	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dikelola	4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Meningkatnya Efektivitas Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dikelola	4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
				Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Meningkatnya Efektivitas Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang dibina dan di Advokasi	4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Indeks Reformasi Hukum		
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan		Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
				Meningkatnya kualitas kebijakan produk hukum daerah	Persentase Penyusunan Perundang-Undangan yang difasilitasi	4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	
				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	
				Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan hukum litigasi, non litigasi dan HAM	Persentase Bantuan Hukum, Litigasi, Non Litigasi dan HAM yang difasilitasi	4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai SAKIP		
					Indeks Pelayanan Publik		
					Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		
					Nilai Survey Indeks Berakhlak		
			Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah		Indeks Kematangan Organisasi	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
				Meningkatkan efektifitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Daerah	Persentase perangkat daerah yang sudah sesuai dengan kelembagaannya	4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan	
				Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Daerah	Persentase Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang difasilitasi	4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
				Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	
				Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	
				Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah			Indeks Kualitas Kebijakan (Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah)		
					Nilai LPPD		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
				Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Umum	Persentase Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan	4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
				Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	4.01.03.1.01.0002 Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	
				Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	4.01.03.1.01.0003 Fasilitas Penataan Wilayah	
				Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Otonomi Daerah yang dilaksanakan	4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Terlaksananya Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	4.01.03.1.02.0001 Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	
				Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	
				Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4.01.03.1.02.0004 Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
				Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4.01.03.1.02.0005 Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
		Terkelolanya Kawasan Perbatasan			Persentase kawasan perbatasan yang dikelola		
			Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Perbatasan		Persentase Kawasan Perbatasan yang Dimanfaatkan	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama yang dilaksanakan	5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	
				Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	5.06.02.1.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	
				Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	5.06.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	
				Terlaksananya penyelesaian batas daerah	Persentase kewilayah di Lokasi Prioritas (Lokpri) yang diselesaikan	5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
				Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	5.06.02.1.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	
				Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	5.06.02.1.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	5.06.02.1.02.0003 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	
				Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	5.06.02.1.02.0004 Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Persentase Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	
				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	5.06.02.1.03.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.06.02.1.03.0003 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Kerjasama Pembangunan			Persentase kerjasama pembangunan yang sudah dilaksanakan		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Efektivitas Kerja Sama Daerah	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
				Meningkatkan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	
				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai SAKIP		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	X.XX.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	X.XX.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X.XX.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	X.XX.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	X.XX.01.1.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	X.XX.01.1.01.0012 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	X.XX.01.1.01.0013 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Indeks Pelayanan Publik		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	X.XX.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	X.XX.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	X.XX.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	X.XX.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	X.XX.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01.1.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
				Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	X.XX.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya pelaksanaan administrasi umum Sekretariat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	X.XX.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	X.XX.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	X.XX.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	X.XX.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	X.XX.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang difasilitasi administrasi Keuangan dan Operasionalnya	X.XX.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	X.XX.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	X.XX.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	X.XX.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	X.XX.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terpenuhinya Fasilitasi Kerumahahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah jenis Layanan kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang difasilitasi	X.XX.01.1.12 Fasilitasi Kerumahahtangaan Sekretariat Daerah	
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	X.XX.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	X.XX.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	X.XX.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Terpenuhinya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah jenis layanan Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	X.XX.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	X.XX.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan	
				Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	X.XX.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	X.XX.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	
				Terpenuhinya Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi keprotokolan yang difasilitasi	X.XX.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	X.XX.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	X.XX.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	X.XX.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Riau secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0	
4.01.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0			
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0	
4.01.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0			
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0	
4.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0			
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0	
4.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0	
4.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0	
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.130.012.608,00		33.208.214.373,00		34.308.200.804,00		35.337.446.828,00		36.397.570.232,00			
Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			29.130.012.608,00		33.208.214.373,00		34.308.200.804,00		35.337.446.828,00		36.397.570.232,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12		12		12		12		12				
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100.000.000,00		114.000.000,00		118.560.000,00		122.116.800,00		125.780.304,00			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	100.000.000,00	12	114.000.000,00	12	118.560.000,00	12	122.116.800,00	12	125.780.304,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		0	
4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		0	
4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000.000,00		6.840.000.000,00		7.045.200.000,00		7.256.556.000,00		7.474.252.680,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		46	6.000.000.000,00		6.840.000.000,00	46	7.045.200.000,00	46	7.256.556.000,00	46	7.474.252.680,00			
4.01.01.1.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				0		0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)			0		0		0		0		0		0	
4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				11.779.154.327,00		11.843.554.327,00		11.859.286.327,00		11.875.490.287,00		11.892.180.365,00			
Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang difasilitasi administrasi Keuangan dan Operasionalnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4	4	11.779.154.327,00	4	11.843.554.327,00	4	11.859.286.327,00	4	11.875.490.287,00	4	11.892.180.365,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2		2		2		2		2				
4.01.01.1.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				3.271.154.327,00		3.271.154.327,00		3.271.154.327,00		3.271.154.327,00		3.271.154.327,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	3.271.154.327,00	2	3.271.154.327,00	2	3.271.154.327,00	2	3.271.154.327,00	2	3.271.154.327,00			
4.01.01.1.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				460.000.000,00		524.400.000,00		540.132.000,00		556.335.960,00		573.026.038,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	2	460.000.000,00	2	524.400.000,00	2	540.132.000,00	2	556.335.960,00	2	573.026.038,00		
4.01.01.1.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4	4	48.000.000,00	4	48.000.000,00	4	48.000.000,00	4	48.000.000,00	4	48.000.000,00		
4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	2	2	8.000.000.000,00	2	8.000.000.000,00	2	8.000.000.000,00	2	8.000.000.000,00	2	8.000.000.000,00		
4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah				11.000.000.000,00		12.540.000.000,00		12.916.200.000,00		13.303.686.000,00		13.702.796.580,00		
Jumlah jenis Layanan kebutuhan Rumah tangga Sekrteriari Daerah yang di fasilitasi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		5	11.000.000.000,00	5	12.540.000.000,00	5	12.916.200.000,00	5	13.303.686.000,00	5	13.702.796.580,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)		4		4		4		4		4			
4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				5.500.000.000,00		6.270.000.000,00		6.458.100.000,00		6.651.843.000,00		6.851.398.290,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		5	5.500.000.000,00	5	6.270.000.000,00	5	6.458.100.000,00	5	6.651.843.000,00	5	6.851.398.290,00		
4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				4.500.000.000,00		5.130.000.000,00		5.283.900.000,00		5.442.417.000,00		5.605.689.510,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		5	4.500.000.000,00	5	5.130.000.000,00	5	5.283.900.000,00	5	5.442.417.000,00	5	5.605.689.510,00		
4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.000.000.000,00		1.140.000.000,00		1.174.200.000,00		1.209.426.000,00		1.245.708.780,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)		4	1.000.000.000,00	4	1.140.000.000,00	4	1.174.200.000,00	4	1.209.426.000,00	4	1.245.708.780,00		
4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				5.850.000.000,00		6.669.000.000,00		6.869.070.000,00		7.075.142.100,00		7.287.396.363,00		
Jumlah jenis layanan Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		12	5.850.000.000,00	12	6.669.000.000,00	12	6.869.070.000,00	12	7.075.142.100,00	12	7.287.396.363,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)		12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)		120		120		120		120		120				
4.01.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan				300.000.000,00		342.000.000,00		352.260.000,00		362.827.800,00		373.712.634,00			
Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)		120	300.000.000,00	120	342.000.000,00	120	352.260.000,00	120	362.827.800,00	120	373.712.634,00			
4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				550.000.000,00		627.000.000,00		645.810.000,00		665.184.300,00		685.139.829,00			
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		12	550.000.000,00	12	627.000.000,00	12	645.810.000,00	12	665.184.300,00	12	685.139.829,00			
4.01.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				5.000.000.000,00		5.700.000.000,00		5.871.000.000,00		6.047.130.000,00		6.228.543.900,00			
Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)		12	5.000.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.871.000.000,00	12	6.047.130.000,00	12	6.228.543.900,00			
4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan				17.750.000.000,00		20.235.000.000,00		20.842.050.000,00		21.467.311.500,00		22.111.330.845,00			
Frekuensi keprotokolan yang difasilitasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)		360	17.750.000.000,00	360	20.235.000.000,00	360	20.842.050.000,00	360	21.467.311.500,00	360	22.111.330.845,00			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)		120		120		120		120		120				
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)		240		240		240		240		240				
4.01.01.1.14.0001 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				8.000.000.000,00		9.120.000.000,00		9.393.600.000,00		9.675.408.000,00		9.965.670.240,00			
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)		240	8.000.000.000,00	240	9.120.000.000,00	240	9.393.600.000,00	240	9.675.408.000,00	240	9.965.670.240,00			
4.01.01.1.14.0002 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8.500.000.000,00		9.690.000.000,00		9.980.700.000,00		10.280.121.000,00		10.588.524.630,00			
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)		120	8.500.000.000,00	120	9.690.000.000,00	120	9.980.700.000,00	120	10.280.121.000,00	120	10.588.524.630,00			
4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1.250.000.000,00		1.425.000.000,00		1.467.750.000,00		1.511.782.500,00		1.557.135.975,00			
Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)		360	1.250.000.000,00	360	1.425.000.000,00	360	1.467.750.000,00	360	1.511.782.500,00	360	1.557.135.975,00			
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				2.356.220.982,00		2.335.442.492,00		2.441.450.519,00		2.550.648.398,00		2.629.993.299,00			
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	40,91	43,00	2.356.220.982,00	44,00	2.335.442.492,00	45,00	2.441.450.519,00	46,00	2.550.648.398,00	47,00	2.629.993.299,00	4.01.5.06.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DAERAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				705.832.798,00		705.832.798,00		734.066.108,00		763.428.750,00		786.331.610,00		
Persentase perangkat daerah yang sudah sesuai dengan kelembagaannya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)		12	705.832.798,00	12	705.832.798,00	12	734.066.108,00	12	763.428.750,00	12	786.331.610,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)		6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)		1		1		1		1		1			
4.01.02.1.01.0001 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				215.210.768,00		215.210.768,00		223.819.198,00		232.771.965,00		239.755.123,00		
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)		6	215.210.768,00	6	215.210.768,00	6	223.819.198,00	6	232.771.965,00	6	239.755.123,00		
4.01.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				218.799.949,00		218.799.949,00		227.551.946,00		236.654.023,00		243.753.643,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)		12	218.799.949,00	12	218.799.949,00	12	227.551.946,00	12	236.654.023,00	12	243.753.643,00		
4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan				271.822.081,00		271.822.081,00		282.694.964,00		294.002.762,00		302.822.844,00		
Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)		1	271.822.081,00	1	271.822.081,00	1	282.694.964,00	1	294.002.762,00	1	302.822.844,00		
4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				1.650.388.184,00		1.629.609.694,00		1.707.384.411,00		1.787.219.648,00		1.843.661.689,00		
Persentase terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)		1	1.650.388.184,00	1	1.629.609.694,00	1	1.707.384.411,00	1	1.787.219.648,00	1	1.843.661.689,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)		4		4		4		4		4			
4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				494.399.478,00		484.399.478,00		503.775.457,00		523.926.475,00		539.644.269,00		
Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		1	494.399.478,00	1	484.399.478,00	1	503.775.457,00	1	523.926.475,00	1	539.644.269,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				515.958.598,00		505.180.108,00		525.387.312,00		546.402.804,00		562.794.888,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)		2	515.958.598,00	2	505.180.108,00	2	525.387.312,00	2	546.402.804,00	2	562.794.888,00		
4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				129.170.338,00		129.170.338,00		146.927.482,00		164.344.443,00		172.100.230,00		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)		1	129.170.338,00	1	129.170.338,00	1	146.927.482,00	1	164.344.443,00	1	172.100.230,00		
4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				220.861.157,00		220.861.157,00		229.695.603,00		238.883.427,00		246.049.929,00		
Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)		1	220.861.157,00	1	220.861.157,00	1	229.695.603,00	1	238.883.427,00	1	246.049.929,00		
4.01.02.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				289.998.613,00		289.998.613,00		301.598.557,00		313.662.499,00		323.072.373,00		
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)		4	289.998.613,00	4	289.998.613,00	4	301.598.557,00	4	313.662.499,00	4	323.072.373,00		
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				4.531.004.520,00		4.491.047.559,00		4.694.900.615,00		4.904.887.745,00		5.057.467.706,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	0	100	4.531.004.520,00	100	4.491.047.559,00	100	4.694.900.615,00	100	4.904.887.745,00	100	5.057.467.706,00	4.01.5.06.0.00.01.00	
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	100		100		100		100		100		00 - SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				1.769.400.000,00		1.749.800.000,00		1.819.792.000,00		1.892.583.680,00		1.949.361.190,00		
Persentase Terlaksananya Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)		1	1.769.400.000,00	1	1.749.800.000,00	1	1.819.792.000,00	1	1.892.583.680,00	1	1.949.361.190,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)		2		2		2		2		2			
4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				809.600.000,00		800.000.000,00		832.000.000,00		865.280.000,00		891.238.400,00		
Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)		2	809.600.000,00	2	800.000.000,00	2	832.000.000,00	2	865.280.000,00	2	891.238.400,00		
4.01.03.1.01.0002 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				459.800.000,00		449.800.000,00		467.792.000,00		486.503.680,00		501.098.790,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)		2	459.800.000,00	2	449.800.000,00	2	467.792.000,00	2	486.503.680,00	2	501.098.790,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.03.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	-	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00			
4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				856.900.000,00		856.900.000,00		891.176.000,00		926.823.040,00		954.627.730,00			
Persentase Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)		1	856.900.000,00	1	856.900.000,00	1	891.176.000,00	1	926.823.040,00	1	954.627.730,00			
	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)		1		1		1		1		1				
	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)		1		1		1		1		1				
4.01.03.1.03.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				505.780.000,00		505.780.000,00		526.011.200,00		547.051.648,00		563.463.197,00			
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)		1	505.780.000,00	1	505.780.000,00	1	526.011.200,00	1	547.051.648,00	1	563.463.197,00			
4.01.03.1.03.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta				183.920.000,00		183.920.000,00		191.276.800,00		198.927.872,00		204.895.708,00			
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)		1	183.920.000,00	1	183.920.000,00	1	191.276.800,00	1	198.927.872,00	1	204.895.708,00			
4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				167.200.000,00		167.200.000,00		173.888.000,00		180.843.520,00		186.268.825,00			
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)		1	167.200.000,00	1	167.200.000,00	1	173.888.000,00	1	180.843.520,00	1	186.268.825,00			
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				158.541.030.223,00		157.247.954.518,00		163.844.988.581,00		170.640.531.779,00		175.578.280.666,00			
Meningkatnya perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	0	100	158.541.030.223,00	100	157.247.954.518,00	100	163.844.988.581,00	100	170.640.531.779,00	100	175.578.280.666,00	4.01.5.06.0.00.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Keagamaan (%)	0	100		100		100		100		100				
4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				44.398.492.227,00		43.398.492.227,00		45.441.547.799,00		47.500.953.366,00		48.744.514.901,00			
Persentase Terfasilitasinya Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)		8	44.398.492.227,00	8	43.398.492.227,00	8	45.441.547.799,00	8	47.500.953.366,00	8	48.744.514.901,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)		1		1		1		1		1				
4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				27.000.000.000,00		26.000.000.000,00		27.040.000.000,00		28.121.600.000,00		28.965.248.000,00			
Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)		1	27.000.000.000,00	1	26.000.000.000,00	1	27.040.000.000,00	1	28.121.600.000,00	1	28.965.248.000,00			
4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				17.398.492.227,00		17.398.492.227,00		18.401.547.799,00		19.379.353.366,00		19.779.266.901,00			
Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)		8	17.398.492.227,00	8	17.398.492.227,00	8	18.401.547.799,00	8	19.379.353.366,00	8	19.779.266.901,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				113.087.537.996,00		112.794.462.291,00		117.306.240.782,00		121.998.490.413,00		125.658.445.125,00		
Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)		1	113.087.537.996,00	1	112.794.462.291,00	1	117.306.240.782,00	1	121.998.490.413,00	1	125.658.445.125,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)		1		1		1		1		1			
4.01.04.1.02.0001 - Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				102.207.537.996,00		101.914.462.291,00		105.991.040.782,00		110.230.682.413,00		113.537.602.885,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)		2	102.207.537.996,00	2	101.914.462.291,00	2	105.991.040.782,00	2	110.230.682.413,00	2	113.537.602.885,00		
4.01.04.1.02.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				330.000.000,00		330.000.000,00		343.200.000,00		356.928.000,00		367.635.840,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)		1	330.000.000,00	1	330.000.000,00	1	343.200.000,00	1	356.928.000,00	1	367.635.840,00		
4.01.04.1.02.0003 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				10.550.000.000,00		10.550.000.000,00		10.972.000.000,00		11.410.880.000,00		11.753.206.400,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)		1	10.550.000.000,00	1	10.550.000.000,00	1	10.972.000.000,00	1	11.410.880.000,00	1	11.753.206.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.04.1.03 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				1.055.000.000,00		1.055.000.000,00		1.097.200.000,00		1.141.088.000,00		1.175.320.640,00		
Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		1	1.055.000.000,00	1	1.055.000.000,00	1	1.097.200.000,00	1	1.141.088.000,00	1	1.175.320.640,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)		1		1		1		1		1			
4.01.04.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				375.000.000,00		375.000.000,00		390.000.000,00		405.600.000,00		417.768.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)		1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	390.000.000,00	1	405.600.000,00	1	417.768.000,00		
4.01.04.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				380.000.000,00		380.000.000,00		395.200.000,00		411.008.000,00		423.338.240,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)		1	380.000.000,00	1	380.000.000,00	1	395.200.000,00	1	411.008.000,00	1	423.338.240,00		
4.01.04.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				300.000.000,00		300.000.000,00		312.000.000,00		324.480.000,00		334.214.400,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	312.000.000,00	1	324.480.000,00	1	334.214.400,00		
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				2.380.678.567,00		2.359.684.397,00		2.466.792.787,00		2.577.124.140,00		2.657.292.642,00		
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	0	91,00	2.380.678.567,00	92,00	2.359.684.397,00	93,00	2.466.792.787,00	94,00	2.577.124.140,00	95,00	2.657.292.642,00	4.01.5.06.0.00.01.00	4.01.5.06.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				1.156.188.970,00		1.156.188.970,00		1.215.157.543,00		1.275.423.487,00		1.316.540.970,00		
Persentase terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)		70	1.156.188.970,00	70	1.156.188.970,00	70	1.215.157.543,00	70	1.275.423.487,00	70	1.316.540.970,00		
	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)		500		500		500		500		500			
	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)		120		120		120		120		120			
	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya (Dokumen)		150		150		150		150		150			
4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				423.084.694,00		423.084.694,00		440.008.081,00		457.608.404,00		471.336.656,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)		70	423.084.694,00	70	423.084.694,00	70	440.008.081,00	70	457.608.404,00	70	471.336.656,00		
4.01.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				183.775.193,00		183.775.193,00		203.847.217,00		212.001.105,00		221.215.918,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)		500	183.775.193,00	500	183.775.193,00	500	203.847.217,00	500	212.001.105,00	500	221.215.918,00		
4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				190.632.743,00		190.632.743,00		198.258.052,00		217.848.018,00		224.383.458,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya (Dokumen)		150	190.632.743,00	150	190.632.743,00	150	198.258.052,00	150	217.848.018,00	150	224.383.458,00		
4.01.05.1.01.0004 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				358.696.340,00		358.696.340,00		373.044.193,00		387.965.960,00		399.604.938,00		
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)		120	358.696.340,00	120	358.696.340,00	120	373.044.193,00	120	387.965.960,00	120	399.604.938,00		
4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum				1.224.489.597,00		1.203.495.427,00		1.251.635.244,00		1.301.700.653,00		1.340.751.672,00		
Persentase terfasilitasinya Bantuan Hukum	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)		15	1.224.489.597,00	15	1.203.495.427,00	15	1.251.635.244,00	15	1.301.700.653,00	15	1.340.751.672,00		
	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)		10		10		10		10		10			
4.01.05.1.02.0001 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				666.312.971,00		645.318.801,00		671.131.553,00		697.976.815,00		718.916.119,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)		10	666.312.971,00	10	645.318.801,00	10	671.131.553,00	10	697.976.815,00	10	718.916.119,00		
4.01.05.1.02.0002 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				558.176.626,00		558.176.626,00		580.503.691,00		603.723.838,00		621.835.553,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)		15	558.176.626,00	15	558.176.626,00	15	580.503.691,00	15	603.723.838,00	15	621.835.553,00		
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				3.025.000.000,00		2.998.323.839,00		3.134.420.700,00		3.274.612.806,00		3.376.478.602,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	0	100	3.025.000.000,00	100	2.998.323.839,00	100	3.134.420.700,00	100	3.274.612.806,00	100	3.376.478.602,00	4.01.5.06.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.040.000.000,00		1.096.415.279,00		1.129.307.737,00		
Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)		1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.040.000.000,00	1	1.096.415.279,00	1	1.129.307.737,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)		1		1		1		1		1			
4.01.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				650.000.000,00		650.000.000,00		676.000.000,00		703.040.000,00		724.131.200,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)		1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	676.000.000,00	1	703.040.000,00	1	724.131.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.06.1.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				350.000.000,00		350.000.000,00		364.000.000,00		393.375.279,00		405.176.537,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)		1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	364.000.000,00	1	393.375.279,00	1	405.176.537,00		
4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber				675.000.000,00		675.000.000,00		702.000.000,00		730.080.000,00		755.609.814,00		
Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)		1	675.000.000,00	1	675.000.000,00	1	702.000.000,00	1	730.080.000,00	1	755.609.814,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)		1		1		1		1		1			
4.01.06.1.02.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				175.000.000,00		175.000.000,00		182.000.000,00		189.280.000,00		198.585.814,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)		1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	182.000.000,00	1	189.280.000,00	1	198.585.814,00		
4.01.06.1.02.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				200.000.000,00		200.000.000,00		208.000.000,00		216.320.000,00		222.809.600,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	208.000.000,00	1	216.320.000,00	1	222.809.600,00		
4.01.06.1.02.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				300.000.000,00		300.000.000,00		312.000.000,00		324.480.000,00		334.214.400,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)		1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	312.000.000,00	1	324.480.000,00	1	334.214.400,00		
4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan				1.350.000.000,00		1.323.323.839,00		1.392.420.700,00		1.448.117.527,00		1.491.561.051,00		
Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)		1	1.350.000.000,00	1	1.323.323.839,00	1	1.392.420.700,00	1	1.448.117.527,00	1	1.491.561.051,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Dokumen)		1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)		1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)		1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)		1		1		1		1		1				
4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				700.000.000,00		673.323.839,00		700.256.792,00		728.267.063,00		750.115.074,00			
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)		1	700.000.000,00	1	673.323.839,00	1	700.256.792,00	1	728.267.063,00	1	750.115.074,00			
4.01.06.1.03.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				150.000.000,00		150.000.000,00		172.163.908,00		179.050.464,00		184.421.977,00			
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)		1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	172.163.908,00	1	179.050.464,00	1	184.421.977,00			
4.01.06.1.03.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				150.000.000,00		150.000.000,00		156.000.000,00		162.240.000,00		167.107.200,00			
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)		1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	156.000.000,00	1	162.240.000,00	1	167.107.200,00			
4.01.06.1.03.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		208.000.000,00		216.320.000,00		222.809.600,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	208.000.000,00	1	216.320.000,00	1	222.809.600,00		
4.01.06.1.03.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				150.000.000,00		150.000.000,00		156.000.000,00		162.240.000,00		167.107.200,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Dokumen)		1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	156.000.000,00	1	162.240.000,00	1	167.107.200,00		
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				2.170.000.000,00		2.150.863.712,00		2.248.493.527,00		2.349.061.088,00		2.422.135.064,00		
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	NA	Level 3	2.170.000.000,00	Level 3	2.150.863.712,00	Level 3	2.248.493.527,00	Level 3	2.349.061.088,00	Level 4	2.422.135.064,00	4.01.5.06.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				600.000.000,00		600.000.000,00		624.000.000,00		648.960.000,00		668.428.800,00		
Persentase terkelolanya pengadaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)		1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	624.000.000,00	1	648.960.000,00	1	668.428.800,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)		1		1		1		1		1			
4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				150.000.000,00		150.000.000,00		156.000.000,00		162.240.000,00		167.107.200,00		
Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)		1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	156.000.000,00	1	162.240.000,00	1	167.107.200,00		
4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				300.000.000,00		300.000.000,00		312.000.000,00		324.480.000,00		334.214.400,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)		1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	312.000.000,00	1	324.480.000,00	1	334.214.400,00		
4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				150.000.000,00		150.000.000,00		156.000.000,00		162.240.000,00		167.107.200,00		
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)		1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	156.000.000,00	1	162.240.000,00	1	167.107.200,00		
4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				870.000.000,00		850.863.712,00		896.493.527,00		932.353.268,00		960.323.866,00		
Persentase terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)		1	870.000.000,00	1	850.863.712,00	1	896.493.527,00	1	932.353.268,00	1	960.323.866,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)		1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)		1		1		1		1		1				
4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				600.000.000,00		580.863.712,00		615.693.527,00		640.321.268,00		659.530.906,00			
Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)		1	600.000.000,00	1	580.863.712,00	1	615.693.527,00	1	640.321.268,00	1	659.530.906,00			
4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				150.000.000,00		150.000.000,00		156.000.000,00		162.240.000,00		167.107.200,00			
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)		1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	156.000.000,00	1	162.240.000,00	1	167.107.200,00			
4.01.07.1.02.0003 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				120.000.000,00		120.000.000,00		124.800.000,00		129.792.000,00		133.685.760,00			
Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)		1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	124.800.000,00	1	129.792.000,00	1	133.685.760,00			
4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				700.000.000,00		700.000.000,00		728.000.000,00		767.747.820,00		793.382.398,00			
Persentase Terbinanya dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)		150	700.000.000,00	150	700.000.000,00	150	728.000.000,00	150	767.747.820,00	150	793.382.398,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		1		1		1		1		1				
4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				200.000.000,00		200.000.000,00		208.000.000,00		216.320.000,00		222.809.600,00			
Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)		150	200.000.000,00	150	200.000.000,00	150	208.000.000,00	150	216.320.000,00	150	222.809.600,00			
4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				350.000.000,00		350.000.000,00		364.000.000,00		378.560.000,00		389.916.800,00			
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	364.000.000,00	1	378.560.000,00	1	389.916.800,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				150.000.000,00		150.000.000,00		156.000.000,00		172.867.820,00		180.655.998,00		
Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	156.000.000,00	1	172.867.820,00	1	180.655.998,00		
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				3.243.540.718,00		3.214.937.341,00		3.360.866.502,00		3.511.186.768,00		3.620.411.845,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	0	100	3.243.540.718,00	100	3.214.937.341,00	100	3.360.866.502,00	100	3.511.186.768,00	100	3.620.411.845,00	4.01.5.06.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1.060.578.715,00		1.050.578.715,00		1.092.601.862,00		1.136.305.935,00		1.170.395.111,00		
Persentase Hasil Evaluasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)		1	1.060.578.715,00	1	1.050.578.715,00	1	1.092.601.862,00	1	1.136.305.935,00	1	1.170.395.111,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)		1		1		1		1		1			
4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				453.242.540,00		443.242.540,00		460.972.241,00		479.411.130,00		493.793.463,00		
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)		1	453.242.540,00	1	443.242.540,00	1	460.972.241,00	1	479.411.130,00	1	493.793.463,00		
4.01.08.1.01.0002 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				253.245.770,00		253.245.770,00		263.375.600,00		273.910.624,00		282.127.942,00		
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)		1	253.245.770,00	1	253.245.770,00	1	263.375.600,00	1	273.910.624,00	1	282.127.942,00		
4.01.08.1.01.0003 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				354.090.405,00		354.090.405,00		368.254.021,00		382.984.181,00		394.473.706,00		
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)		1	354.090.405,00	1	354.090.405,00	1	368.254.021,00	1	382.984.181,00	1	394.473.706,00		
4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				2.182.962.003,00		2.164.358.626,00		2.268.264.640,00		2.374.880.833,00		2.450.016.734,00		
Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen)		2	2.182.962.003,00	2	2.164.358.626,00	2	2.268.264.640,00	2	2.374.880.833,00	2	2.450.016.734,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)		2		2		2		2		2			
4.01.08.1.02.0001 - Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				303.245.770,00		303.245.770,00		332.707.270,00		361.901.169,00		376.647.681,00		
Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen)		2	303.245.770,00	2	303.245.770,00	2	332.707.270,00	2	361.901.169,00	2	376.647.681,00		
4.01.08.1.02.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				450.000.000,00		450.000.000,00		468.000.000,00		486.720.000,00		501.321.600,00		
Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)		1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	468.000.000,00	1	486.720.000,00	1	501.321.600,00		
4.01.08.1.02.0003 - Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1.429.716.233,00		1.411.112.856,00		1.467.557.370,00		1.526.259.664,00		1.572.047.453,00		
Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)		2	1.429.716.233,00	2	1.411.112.856,00	2	1.467.557.370,00	2	1.526.259.664,00	2	1.572.047.453,00		
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN				668.000.000,00		662.109.198,00		692.162.984,00		723.121.109,00		745.615.771,00		
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				668.000.000,00		662.109.198,00		692.162.984,00		723.121.109,00		745.615.771,00		
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase Kawasan Perbatasan yang dikelola (%)	0	100	668.000.000,00	100	662.109.198,00	100	692.162.984,00	100	723.121.109,00	100	745.615.771,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH	
5.06.02.1.01 - Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama				170.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		197.000.000,00		
Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)			170.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		197.000.000,00		
	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)		1		1		1		1		1			
5.06.02.1.01.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah					0		0		0		0			
Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)				0		0		0		0			
5.06.02.1.01.0002 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan				170.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		197.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)		1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	180.000.000,00	1	190.000.000,00	1	197.000.000,00		
5.06.02.1.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan				498.000.000,00		492.109.198,00		512.162.984,00		533.121.109,00		548.615.771,00		
Persentase Terelesaikannya kewilayah di Lokasi Prioritas (Lokpri)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (Dokumen)		1	498.000.000,00	1	492.109.198,00	1	512.162.984,00	1	533.121.109,00	1	548.615.771,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)		1		1		1		1		1			
5.06.02.1.02.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				130.000.000,00		130.000.000,00		149.162.984,00		160.121.109,00		168.615.771,00		
Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)		1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	149.162.984,00	1	160.121.109,00	1	168.615.771,00		
5.06.02.1.02.0002 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
5.06.02.1.02.0003 - Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara				368.000.000,00		362.109.198,00		363.000.000,00		373.000.000,00		380.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (Dokumen)		1	368.000.000,00	1	362.109.198,00	1	363.000.000,00	1	373.000.000,00	1	380.000.000,00		

4.3. Subkegiatan Prioritas rangka mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah

Adapun Subkegiatan Prioritas rangka mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah in:

TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
1	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat
			4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	
			4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	
			4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
			4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
			4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	
			4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	
			4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
			4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
			4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Biro Perekonomian
			4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	
			4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	
			4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
			4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
			4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
			4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
			4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
			4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	
			4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	
			4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
			4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	
			4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	
3	Program Penataan Organisasi	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	4.01.02.1.01 Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Biro Organisasi
			4.01.02.1.01.0001 Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	
			4.01.02.1.01.0002 Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
			4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan	
			4.01.02.1.02 Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
			4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
			4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
			4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
			4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	
			4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	
4	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Biro Hukum
			4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	
			4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	
			4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	
			4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	
			4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	
			4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	
			4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	
5	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan OTDA
			4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	
			4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	
			4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah	
			4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
			4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	
			4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	
			4.01.03.1.02.0004 Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
			4.01.03.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
			4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
			4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	
			4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	
			4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan strategis organisasi. IKU menjadi tolok ukur utama yang mencerminkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kunerja Utama(IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KE T.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84,65	84,74	84,83	84,91	85,00	85,09	
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Skor	65,00	68,00	70,00	73,00	75,00	78,00	
3	Persentase BLUD yang berkinerja baik	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase BUMD yang berkinerja baik	Persentase	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	74,00	74,30	74,50	74,60	74,80	75,00	
6	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	84,00	84,30	84,80	85,00	85,50	86,00	
7	Nilai SAKIP	Nilai	60,75	61,40	62,05	62,70	63,35	64,00	
8	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,13	4,14	4,15	4,16	4,17	4,18	
9	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	95,50	96,60	96,70	96,80	96,90	97,00	
10	Nilai Survey Indeks Berakhlak	Poin	71,52	73,64	75,00	76,00	77,00	78,00	
11	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi (3,41)	Tinggi (3,41)	Tinggi (3,41)	Tinggi (3,41)	Tinggi (3,41)	Tinggi (3,41)	
12	Persentase kerjasama pembangunan yang sudah dilaksanakan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Persentase kawasan perbatasan yang dikelola	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian hasil dari program, kegiatan, atau subkegiatan dalam satuan kerja pemerintahan. IKK lebih bersifat operasional dan teknis, dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat strategis. Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kunerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Provinsi Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	

5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Keagamaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
7	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00	
8	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	
9	Persentase Kawasan Perbatasan yang dikelola	Persentase	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Riau setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Riau agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pekanbaru, September 2025

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PIMPINAN

DODY SAPUTRA DINATA, S.STP, M.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19900122 201010 1 002